BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan juga menyediakan berbagai produk jasa keuangan seperti kredit, menyimpan uang dan juga memberikan nasehat tentang keuangan, di Indonesia banyak sekali lembaga perkreditan yang sudah beroperasi dan telah terdaftar dan mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga perkreditan ini memiliki fungsi sebagai sumber pendanaan bagi masyarakat yang memerlukan pendanaan, akan membantu masyarakat dalam memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terutama bagi masyarakat yang tidak mendapatkan layanan dari bank konvensional yang ada di Indonesia.

Selanjutnya lembaga perkreditan ini juga akan memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan konsumsi yang dimana kredit yang diberikan bisa berupa kredit modal usaha, kredit konsumsi, kredit investasi dan juga kredit lainnya. Selain itu juga lembaga perkreditan akan memberikan efek berupa meningkatnya perekonomian dengan memberikan kredit kepada masyarakat karena pemberian kredit yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka akan membantu meningkatkan daya beli dan juga aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut.¹

Lembaga perkreditan tersebut selain memberikan kredit juga melayani simpan pinjam, jasa keamanan, transfer dana dan juga melayani konsultasi

¹ Chairil Susanto, 2014, Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 5, Volume 2, hlm.1-5.

keuangan. Di Indonesia terdapat banyak lembaga perkreditan di antaranya dijelaskan sebagai berikut yang pertama ada Bank umum yang merupakan salah satu lembaga yang diberikan ijin oleh OJK untuk melakukan kegiatan usahanya dalam bidang penerimaan simpanan dari nasabah, penghimpunan dana, dan juga memberikan kredit kepada masyarakat, yang kedua ada Koperasi simpan pinjam yang dimana koperasi simpan pinjam ini berbasis koperasi dan juga memberikan pinjaman kepada anggotanya, yang ketiga ada lembaga keuangan mikro yang dimana lembaga ini akan memberikan kredit kecil kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga masyarakat yang tidak memenuhi syarat di lembaga keuangan konvensional, ke empat ada Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia (LPPI), yang dimana lembaga ini akan memberikan pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan yang ada di Indonesia dan ada juga lembaga perkreditan masyarakat atau BPR.²

Badan perkreditan rakyat atau disingkat BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat, BPR memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dengan syarat yang cukup mudah dan juga cepat. BPR sendiri memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan pendanaan yang dimana di bank konvensional dia tidak mendapatkan kredit karena tidak memenuhi syarat atau karena suatu hal tertentu³. BPR ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10

² Ronny Kusnandar, SH., SpN., 2013, Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, hlm. 63-64.

³ Ali Suyanto Herli, 2013, Pengelolaan BPR dan Lembaga keuangan Pembiayaan Mikro, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm.3.

Tahun 1998, BPR ini lebih berfokus pemberian dana kepada UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan juga kepada masyarakat yang kurang mampu selain itu juga BPR membantu dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat melalui program yang bernama CSR (*Corporate Social Responsibility*). Di semua bank di Indonesia pasti memiliki permasalahan yang dihadapinya seperti kredit macet yang dialami oleh para nasabah bank, kredit macet ini biasanya diakibatkan oleh faktor ekonomi, perubahan situasi bisnis, bencana alam yang dialami dan juga karena adanya kebijakan baru dari pemerintah misalkan yang berkaitan dengan pajak, regulasi ataupun peraturan lainnya, untuk mengatasi hal tersebut maka bank akan menawarkan berbagai alternatif penyelesaian masalah.⁴

Pada Penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan terkait dengan permasalahan bagaimana cara mengatasi apabila ada kredit macet khususnya di BPR, BPR sama juga dengan bank lain yang dimana pastinya mengalami masalah dalam prekreditasi, yang dimana akan memberikan dampak kepada kualitas portofolio kreditnya, salah satu contoh dari permasalahan kredit yang terjadi yaitu adanya kredit macet karena nasabah tidak mampu membayar angsuran kredit tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang dialaminya. Resiko kredit ini dapat diatasi dengan salah satu alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh BPR yaitu pengambil alihan agunan, pengambil alihan agunan ini dilakukan apabila ada nasabah tidak bisa membayar kreditnya tepat waktu dan lewat dari masa tenggang yang sudah disepakati bersama.⁵ Dalam pengambil alihan agunan ini BPR akan

⁴ Ibid.

⁵ Soleha, 2019, Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Restrukturisasi Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus BPR Lestari Jakarta Barat), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang ,Vol.2,No.2, hlm. 641-644.

mengambil alih agunan yang digunakan sebagai jaminan oleh nasabah, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018, tepatnya pada pasal 1 ayat (11) bahwa agunan yang diambil alih untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah aset yang di peroleh Bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban terhadap bank. Yang dimana agunan ini dapat berupa tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, ataupun aset-aset lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan, kemudian agunan yang diambil alih oleh BPR akan digunakan untuk melunasi hutang dari nasabah tersebut.⁶

Pengambil alihan agunan oleh BPR diatur dalam beberapa peraturan diataranya adalah Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tepatnya pada pasal 48 ayat (1), Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 Tahun 1996 Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah tepatnya pada pasal 6, Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum. Namun mulai tanggal 31 Desember 2013 Bank Indonesia sudah tidak lagi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank dikarenakan kegiatan pengawasan dan juga pengaturan kegiatan jasa keuangan sektor keuangan beralih dari bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selanjutnya Bank Indonesia juga sudah tidak melakukan pengawasan dan juga pengaturan terhadap BPR dikarenakan sesuai hal ini, sesuai dengan Undang-Undang OJK, sehingga pada tanggal 27 Desember 2018 OJK telah menerbitkan

⁶ Ibid.

peraturan baru yaitu Peraturan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR yang dimana di dalam peraturan ini juga mengatur tentang AYDA. Dengan adanya peraturan terbaru ini maka untuk selanjutnya peraturan PBI Nomor 18/19/PBI/2006 juncto PBI Nomor 13/26/PBI/2011 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada pasal 27 ayat (1) bahwa BPR akan melakukan pengambil alihan agunan untuk kredit yang memiliki kualitas macet, selanjutnya Peraturan OJK nomor 33 /POJK.03/ Tahun 2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan aset produktif bank perkreditan rakyat yang dimana disingkat POJK KAP PPAP BPR, pada pasal 28 ayat (1) sampai ayat (5) POJK merupakan salah satu landasan bagi BPR dalam melakukan AYDA dikarenakan di bentuk oleh otoritas jasa pengawas berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Jadi dalam penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana pengambil alihan agunan sebagai alternatif penyelesaian kredit macet yang terjadi di BPR, dimana penulis akan melakukan penelitian di PT.Bank Perkreditan Rakyat Parasari Sibang Kabupaten Badung ,Bali yang dimana BPR ini merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang berlokasi di jalan raya sibang no 168, desa sibang kaja, kecamatan abiansema kabupaten badung Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis akan mengambil dua rumusan masalah yang akan di bahas di dalam penelitian ini Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dalam pengambil alihan agunan sebagai penyelesaian kredit macet?

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet melalui agunan yang diambil alih (AYDA) pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Parasari Sibang Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam melakukan penelitian terdapat ruang lingkup masalah yang bertujuan untuk membatasi pembahasan terkait hal yang akan dibahas agar tidak keluar dari permasalahan utama, dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan terkait dengan pengambil alihan agunan untuk mengatasi kredit macet yang dialami oleh nasabah BPR, yang dimana BPR yaitu pada BPR Parasari Sibang Kabupaten Badung.

1.3.1 Batasan pada rumusan masalah yang pertama, penulis membatasi masalah hanya pada mekanisme/tata cara/aturan suatu bank dalam pengambilalihan agunan untuk penyelesaian kredit macet oleh nasabahnya.

1.3.2 Batasan pada rumusan masalah yang kedua adalah penulis membatasi permasalahan yaitu khusus membahas penyelesaian kredit macet dengan cara pengambilalihan agunan nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Parasari Sibang Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada saat melakukan sebuah penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai, di dalam penelitian ini memiliki tujuan yang dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi khususnya pada bidang

penelitian yang dilakukan mahasiswa.

2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan starta 1 (S1) di fakultas hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yaitu:

1. Untuk mengetahui tata cara atau mekanisme yang diberlakukan oleh bank dalam pengambilalihan agunan sebagai alternatif penyelesaian kredit macet, khususnya pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Parasari Sibang Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui seberapa efisien dari pengambil alihan agunan yang dilakukan oleh bank sebagai alternatif penyelesain masalah kredit macet yang dialami oleh nasabah bank selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengambil alihan agunan dalam menyelesaikan kredit yang macet pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Parasari Sibang Kabupaten Badung.

1.5 Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian metode penelitian sangat penting dan harus ada dikarenakan metode penelitian ini akan membantu penulis untuk mengumpulkan data yang relevan dan untuk menganalisis data untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris adalah metode penelitian

yang dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran secara langsung⁷, terkait dengan objek yang akan diteliti agar tidak hanya menggunakan asumsi atau berdasarkan pendapat sendiri, metode penelitian ini akan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui pengamatan, wawancara dan juga percobaan secara langsung untuk menulis penelitian yang akan ditulis yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut berdasarkan fakta ataupun data yang ditemukan dilapangan, metode penelitian ini akan melibatkan proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris yuridis, yang dimana jenis penelitian ini akan menggabungkan pendekatan yuridis dan juga empiris dalam rangka memahami fenomena hukum secara lebih komprehensif, yang dimana analisis data ataupun dokumen hukum akan digabungkan dengan penelitian empiris yang dilakukan dilapangan melalui wawancara secara langsung yang akan dilakukan oleh peneliti.⁹

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian menggunakan pendekatan sangatlah penting dikarenakan pendekatan berfungsi sebagai petunjuk bagaimana penelitian tersebut dilakukan dan apa yang kemudian akan menjadi fokus utama dari

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, hlm.280.

⁸ Mudjia Rahardjo, 2011, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, URL : <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 10 April 2023

⁹ I Ketut Suardita, SH.,MH., 2017, Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum, Pengenalan Bahan Hukum, hlm. 4.

penelitian yang akan dilakukan, di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu cara pandang yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari antara hukum dan juga masyarakat, pendekatan ini akan mengeksplorasi terkait dengan bagaimana peran hukum dalam mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, pola kebijakan publik serta interaksi antara individu dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan secara sosiologis langsung yang dilaksanakan di PT BPR Parasari Sibang kabupaten badung yang dimana untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat di daerah sana yang mengakibatkan terjadinya permasalahan kredit yang dialami oleh masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi hukum adalah jenis pendekatan yang dimana pendekatan itu menggabungkan psikologi dan hukum dalam mempelajari perilaku hukum, kebijakan hukum dan juga sistem hukum Yang dimana penelitian ini akan menekankan pengaruh dari faktor psikologi dan pembentukan implementasi hukum dan juga bagaimana hukum tersebut akan mempengaruhi perilaku manusia. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui alasan nasabah mengalami kredit macet dan alasan bank menggunakan agunan sebagai penyesain kredit bermasalah. ¹¹

¹⁰ Takuya, 2012, Metode Pendekatan Sosiologi Hukum, URL : www.scribd.com/Metode-Pendekatan-Sosiologi-Hukum, diakses pada 10 April 2023

¹¹ Abdul Rachmad Budiono, 2008, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum, karya ilmiah hlm. 9-12

1.5.3 Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian sumber data juga sangat penting dikarenakan sumber data akan memberikan data-data terkait apa yang akan kita lakukan sumber data ini di setiap penelitian akan berbeda-beda tergantung penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder yang dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari penelitian langsung di PT BPR Parasari sibang kabupaten badung yang dimana untuk mengetahui terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dimana sumber data tersebut akan dipakai untuk menjadi bahan dalam menjawab rumusan masalah yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang didapatkan dari jurnal dan juga buku-buku hukum yang dimana terdapat data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sumber data skunder ini dapat berupa¹²:

A. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

¹² Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

- c. Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.

B. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku;
- b. Jurnal Hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus.

1.5.3.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data ketiga yang dimana dalam penelitian ini penulis mengambil data yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia¹³.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan penelitian diperlukan Teknik pengumpulan data¹⁴, dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan dua Teknik yaitu Teknik studi dokumen dan juga teknik wawancara atau interview, kedua Teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.4.1 Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dimana dilakukan dengan menganalisis dari catatan, laporan, dan buku-buku hukum yang

¹³ Kadek Apriliani, Pelaksanaan pelatihan Kerja Di Lembaga Pelatihan Kerja Bali Quration And Tourism Center (BATC) Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Khatulistiwa Law Review, 2020, Vol. 1, No. 2, hlm. 96.

¹⁴ Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfa beta, hlm. 13.

memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan¹⁵, di dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi dokumen dari catatan atau laporan bank parasari serta buku-buku hukum yang berakitan dengan penelitian ini.

1.5.4.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akan melibatkan pertemuan antara peneliti dan juga narasumber yang mengetahui informasi lebih dalam terkait dengan hal yang akan diteliti, dalam Teknik wawancara ini peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kemudian narasumber akan memberikan jawaban terkait dengan apa yang kita tanyakan dan selanjutnya peneliti akan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber yang kemudian akan dimasukkan ke dalam hasil dari penelitian, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan data-data yang valid di BPR Parasari Sibang kabupaten badung.¹⁶

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian berfungsi untuk mengolah data yang di dapatkan sehingga dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat, dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami terkait dengan fenomena sosial yang dilihat dari sudut pandang partisipan, dan dalam penelitian secara kualitatif yang diteliti adalah kondisi dari objek hukum sehingga penelitian kualitatif ini memiliki karakteristis yaitu

¹⁵ Haris Herdiansyah, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, hlm. 143.

¹⁶ Hadi Sabari Yunus, 2010, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 356.

lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analistis, induktif yang dimana lebih mengutamakan adanya proses pemaknaan bukan hanya hasil saja.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sistematika penulisan pada Bab I adalah yang pertama di bagian awal ada latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan yang kedua ada rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah ini dibagi menjadi dua rumusan masalah, selanjutnya yang ketiga ada tujuan penelitian yang meliputi tujuan penelitian secara umum dan juga tujuan penelitian secara khusus, yang keempat ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi penjelasan mengenai apa saja jenis penelitiannya, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir di bab I adalah sistematika penulisan dari setiap Bab dalam penelitian ini.

Dalam Bab II, terdapat tentang teori hukum yang digunakan dalam penelitian, tinjauan tentang kredit, prinsip pemberian kredit, kredit macet yang di dalamnya membahas terkait dengan penanggulangan kredit macet dan selanjutnya terdapat penjelasan terkait dengan pengaturan pengambilalihan agunan dalam penelitian ini dan yang terakhir ada hipotesa.

¹⁷ Abdul Rachmad Budiono, 2008, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum, karya ilmiah hlm. 25-26